Renja Perubahan 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Tanah Grogot, Kabupaten Paser
Kode Pos 76211, *Email :* *kesbangpol_paser@yahoo.com*

Lampiran :
Tanggal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Paser Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2025 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 20052025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ;
23. Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;
24. Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Paser Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022.
26. Peraturan Bupati Paser Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Tanggal 31 Juli 2023.
27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang APBD Tahun 2025 Tanggal 30 Desember 2024.
28. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2025 Tanggal 30 Desember 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Hasil evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Laporan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sampai Dengan Triwulan Ke I Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel		Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP				50.805.251.630,00	BB	16.689.387.613,00															
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Sekertariat	80	30.239.441.080,00	100%	7.824.770.790,00	100%	7.505.905.555,00	24,95	1.872.455.827,00							24,95	1.872.455.827,00	25,95	9.697.226.617,00		0,32	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	216.375.104,00	100%	162.434.680,00	100%	194.905.513,00	34,92	68.057.908,00							34,92	68.057.908,00	35,92	230.492.588,00		1,07	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	25	72.799.919,00	5	55.096.000,00	3	85.229.513,00	1	34.988.208,00							1	34.988.208,00	6	90.084.208,00		1,24	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen RKA SKPD	0	-	1	48.248.680,00	2	52.676.000,00	1	20.906.200,00							1	20.906.200,00	2	69.154.880,00		-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		0	-	0	-	2	22.000.000,00	0	-							-	-	-	-		-	
		Evalusi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	143.575.185,00	5	59.090.000,00	4	35.000.000,00	2	12.163.500,00							2	12.163.500,00	7	71.253.500,00		0,50	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	100%	27.811.063.903,00	97%	6.349.535.004,00	97%	6.733.472.192,00	24,90	1.676.549.777,00							24,90	1.676.549.777,00	25,87	8.026.084.781,00		0,29	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	175	25.948.582.358,00	25	5.925.184.416,00	30	6.267.555.604,00	7	1.563.720.845,00							7	1.563.720.845,00	32	7.488.905.261,00		0,29	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	1270	1.862.481.545,00	250	424.350.588,00	270	465.916.588,00	56	112.828.932,00							56	112.828.932,00	306	537.179.520,00		0,29	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Daerah	100%	1.647.683.741,00	96%	1.210.806.920,00	96%	497.417.850,00	24,23	120.531.402,00							24,23	120.531.402,00	25,19	1.331.338.322,00		0,81	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	1.800.653,00	1	700.800,00	1	2.320.000,00	0	-							-	-	1	700.800,00		0,39	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	10	101.156.250,00	2	473.517.450,00	2	137.132.850,00	1	38.950.000,00							1	38.950.000,00	3	512.467.450,00		5,07	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang tersedia	10	210.788.854,00	2	46.259.200,00	2	45.000.000,00	1	33.257.907,00							1	33.257.907,00	3	79.517.107,00		0,38	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Bahan Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10	182.333.122,00	2	26.559.800,00	2	32.500.000,00	1	16.115.523,00							1	16.115.523,00	3	42.675.323,00		0,23	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan	60	26.604.861,00	12	5.200.000,00	1	5.000.000,00	0	-							-	-	12	5.200.000,00		0,20	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30	100.000.000,00		-	4	5.000.000,00	0	-							-	-	-	-		-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	600	1.000.000.000,00	120	658.569.670,00	4	270.465.000,00	1	32.207.972,00							1	32.207.972,00	121	690.777.642,00		0,69	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	Tersedianya Barang Milik Pemerintah Daerah	12	97.664.588,00	100%	32.012.150,00	100%	5.000.000,00	13,40	670.000,00							13,40	670.000,00	14,40	32.682.150,00		0,33	
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	12	97.664.588,00	2	32.012.150,00	1	5.000.000,00	0	670.000,00							-	670.000,00	2	32.682.150,00		0,33	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	362.051.812,00	100%	24.663.036,00	100%	15.500.000,00	42,88	6.646.740,00							42,88	6.646.740,00	43,88	31.309.776,00		0,09	
		Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	32.734.509,00	12	7.429.800,00	4	10.500.000,00	1	3.785.000,00							1	3.785.000,00	13	11.214.800,00		0,34	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunukasi, jaringan sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	60	329.317.303,00	2	17.233.236,00	12	5.000.000,00	1	2.861.740,00							1	2.861.740,00	3	20.094.976,00		0,06	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	104.601.931,00	100%	45.319.000,00	100%	59.610.000,00	-	-							-	-	1,00	45.319.000,00		0,43	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	33.090.872,00	3	37.760.000,00	3	36.000.000,00	0	-							-	-	3	37.760.000,00		1,14	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	50	36.511.059,00	10	7.559.000,00	10	23.610.000,00	0	-							-	-	10	7.559.000,00		0,21	

		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Penurunan Konflik Berbau Sara	100%	764.791.141,32	100%	4.940.224.215,00	100%	2.284.753.229,00	8,74	199.641.000,00							8,74	199.641.000,00	9,74	5.139.865.215,00		6,72	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Teknis dibidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	30	764.791.141,32	100%	4.940.224.215,00	100%	2.284.753.229,00	8,74	199.641.000,00							8,74	199.641.000,00	9,74	5.139.865.215,00		6,72	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10	255.700.803,82	2	60.000.000,00	3	322.829.907,00	0	-							-	-	2	60.000.000,00		0,23	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	440	407.272.270,00	90	4.880.224.215,00	25	221.606.000,00	0	-							-	-	90	4.880.224.215,00		11,98	
		Pembentukan Paskibraka						100	1.740.317.322,00	12	199.641.000,00							12,00	199.641.000,00	12	199.641.000,00		-	
	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu																					
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80%	4.277.106.495,25		33.991.031.553,00	100%	2.655.851.490,00	1,65	43.767.000,00							1,65	43.767.000,00	1,65	34.034.798.553,00		7,96	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilhan Umum/Pemilhan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilhan Umum/Pemilhan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah . Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi	25	4.277.106.495,25		33.991.031.553,00	100%	2.655.851.490,00	1,65	43.767.000,00							1,65	43.767.000,00	1,65	34.034.798.553,00		7,96	
		Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilhan Umum/Pemilhan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilhan Umum/Pemilhan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun.	10	12.500.000,00	2	25.124.000,00	0	-															
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilhan Umum/Pemilhan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilhan Umum/Pemilhan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun.	5	12.500.000,00	1	21.472.500,00	0	-															
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilhan Umum/Pemilhan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilhan Umum/Pemilhan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	6650	253.550.339,00	2650	1.025.396.300,00	150	91.000.000,00		-							-	-	2.650	1.025.396.300,00		4,04	
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilhan Umum/Pemilhan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilhan Umum/Pemilhan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1635	3.883.356.744,00	400	32.355.244.353,00	100	2.414.851.490,00	10	26.047.400,00							10,00	26.047.400,00	410	32.381.291.753,00		8,34	

		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15	115.199.414,00	3	563.794.400,00	3	150.000.000,00	1	17.719.600,00							1,00	17.719.600,00	4	581.514.000,00		5,05	
	Mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan ormas		Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan																					
		Program Pemberdaayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Organisasi Masyarakat (Ormas) yang aktif	75%	643.825.476,00	100%	908.741.292,00	100%	356.961.800,00	2,90	10.346.000,00							2,90	10.346.000,00	3,90	919.087.292,00		1,43	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan	25	643.825.476,00	100%	908.741.292,00	100%	356.961.800,00	2,90	10.346.000,00							2,90	10.346.000,00	3,90	919.087.292,00		1,43	
		Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun.	8	7.500.000,00	2	18.890.392,00	0	-	-	-													
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun.	8	7.500.000,00	2	17.724.000,00	0	-	-	-													
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	890	196.287.300,00	200	242.473.300,00	200	156.961.800,00	20	10.346.000,00							20,00	10.346.000,00	220	252.819.300,00		1,29	
		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	920	190.149.200,00	300	238.295.600,00	300	100.000.000,00	0	-							-	-	300	238.295.600,00		1,25	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10	232.388.974,00	2	391.358.000,00	2	100.000.000,00	0	-							-	-	2	391.358.000,00		1,68	
	Mewujudkan ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama		Fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya																					
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Presentase kebijakan bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti	100%	4.429.085.918,00	100%	295.000.000,00	100%	1.489.817.770,00	-	-							-	-	1,00	295.000.000,00		0,07	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan budaya yang dirumuskan	25	4.429.085.918,00	100%	295.000.000,00	100%	1.489.817.770,00	-	-							-	-	1,00	295.000.000,00		0,07	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25	1.018.180.675,00	5	80.000.000,00	3	663.878.070,00	0	-							-	-	5	80.000.000,00		0,08	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	560	2.570.905.848,00	120	200.000.000,00	120	725.939.700,00	0	-							-	-	120	200.000.000,00		0,08	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20	76.363.550,63	4	15.000.000,00	4	100.000.000,00	0	-							-	-	4	15.000.000,00		0,20	

	Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman		Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser																					
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Presentase kasus konflik sosial yang tertangani / terselesaikan	100%	8.304.752.763,68	100%	2.845.483.780,00	100%	2.396.097.769,00	4,10	98.279.023,00							4,10	98.279.023,00	5,10	2.943.762.803,00		0,35	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social yang dirumuskan	30	8.304.752.763,68	100%	2.845.483.780,00	100%	2.396.097.769,00	4,10	98.279.023,00							4,10	98.279.023,00	5,10	2.943.762.803,00		0,35	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10	15.920.453,26	2	39.196.460,00	2	46.097.769,00	0	450.000,00							-	450.000,00	2	39.646.460,00		2,49	
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	2	26.235.093,75	2	154.596.460,00	2	76.097.769,00	0	-							-	-	2	154.596.460,00		5,89	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	23	1.048.840.625,00	23	195.065.860,00	20	150.000.000,00	2	27.050.760,00							2,00	27.050.760,00	25	222.116.620,00		0,21	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	636.362.921,88	12	615.125.000,00	20	420.000.000,00	2	1.350.000,00							2,00	1.350.000,00	14	616.475.000,00		0,97	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4	122.204.590,06	4	441.510.000,00	6	250.000.000,00	0	-							-	-	4	441.510.000,00		3,61	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupa-ten/Kota	60	5.345.448.543,75	12	1.399.990.000,00	2	1.453.902.231,00	1	69.428.263,00							1,00	69.428.263,00	13	1.469.418.263,00		0,27	
									Rata-rata capaian kinerja (%)							10,58	2.224.488.850				16,85	
									Predikat Kinerja							Sangat Rendah						

Berdasarkan Tabel 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2025 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan I adalah 10,58 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.224.488.850 (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp.16.689.387.613 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah)
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Paser sebesar 10,58 % dengan predikat kinerja sangat rendah .
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 Indikator, capaian kinerja >70%-100% = 0 Indikator, capaian kinerja >50%-70% = Indikator capaian kinerja 0%-50% = 10 Indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

A. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mempunyai tugas membantu Bupati Paser dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
    a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
    b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan

organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;

c. Pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penganganan konflik sosial;
e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;dan
g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagai berikut :

I. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
II. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
III. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi terdiri dari:
    1. Subbidang Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan.
    2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.
IV. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
    1. Subbidang Politik Dalam Negeri.

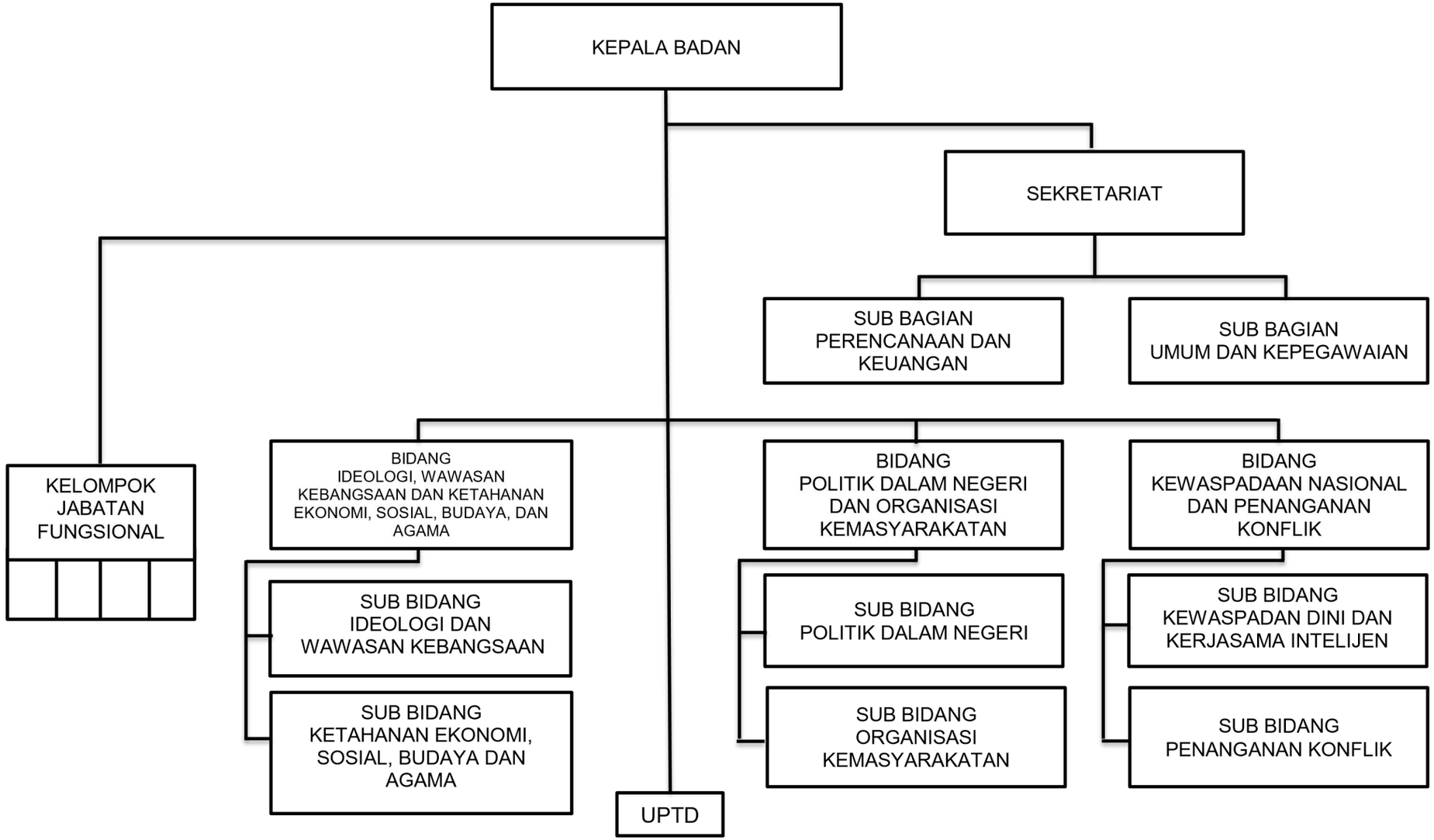
2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

V. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik terdiri dari :

1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen.
2. Subbidang Penanganan konflik.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dapat dilihat pada bagan Gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER



sumber : Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser terdapat dalam Tabel di bawah ini

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -					Realisasi	Capaian Kinerja
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas		Indikator Penilaian mandiri reformasi birokrasi	70 B	73 B	75 B	80 B	85 B	1.872.455.872	24,95 %
			Nilai Sakip dari Inspektorat	B	B	BB	A	A	A 80B	
2	Mewujudkan Masyarakat yang memahami dan menjaga kesatuan bangsa dan politik	Mewujudkan Masyarakat kabupaten paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi pokitik yang demokratis	Fasilitasi penyelenggaraan pemilu	76%	78%	80%	85%	90%	43.767.000	1,65 %
3		mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan ormas	Presentase masyarakat yang difasilitasi	80%	80%	90%	100%	100%	10.346.000	2,90%
4		mewujudkan ketahanan ekonomi,sosial budaya dan agama	fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	80%	80%	90%	100%	100%	0	0 %

5		Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman	terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser	100%	100%	100%	100%	100%	98.279.023	4,10 %
6		meningkatkan pemahaman idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan	peningkatan kesadaran masyarakat tentang idiologi pancasila	100%	100%	100%	100%	100%	199.641.000	8,74 %

Berdasarkan Tabel di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Tujuan " Mewujudkan Masyarakat yang memahami dan menjaga kesatuan bangsa dan Politik." memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar Rp. 1.872.455.872 dari target sebesar Rp. 7.505.905.555 dengan capaian kinerja sebesar 24,95 %;

b. 1). Sasaran "Mewujudkan masyarakat Kabupaten paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Fasilitasi penyelenggaraan pemilu", belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar Rp. 43.767.000 dari target sebesar Rp. 2.655.851.490 dengan capaian kinerja sebesar 1,65 %

2). Sasaran mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan ormas memiliki 1 indikator kinerja yaitu Presentase masyarakat yang difasilitasi belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar Rp. 10.346.000 dari target sebesar Rp. 356.961.800 dengan capaian kinerja sebesar 2,90 %

3). Sasaran mewujudkan ketahanan ekonomi , sosial budaya dan agama memiliki 3 indikator kinerja yaitu fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar Rp. 0 dari target sebesar Rp. 295.000.000 dengan capaian kinerja sebesar 0 %

4). Sasaran Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman memiliki 1 indikator kinerja yaitu terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar Rp. 98.279.023 dari target sebesar Rp. 2.396.097.769 dengan capaian kinerja sebesar 4,10 %

5) Sasaran meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan memiliki 1 indikator kinerja yaitu peningkatan kesadaran masyarakat tentang ideologi Pancasila belum mencapai target, dimana realisasinya sebesar Rp. 199.641.000 dari target sebesar Rp. 2.284.753.229 dengan capaian kinerja sebesar 8.74 %

2.2. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih belum sesuI dengan Anggaran yaitu sebesar 10,58 % dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Periode Januari – Maret 2025 :

1. Adanya Kerja Sama yang solid menyebabkan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang dijadwalkan.

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Belum adanya kepastian tahapan pemilu sehingga untuk Anggaran Pendampingan Pemilu belum dapat dilaksanakan tepat waktu.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, beberapa target tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mengalami perubahan penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi	Target	
					Renja 2025	Perubahan Renja 2025
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	Indikator Penilaian mandiri reformasi birokrasi	Cukup Jelas	24,95 %	
			Nilai Sakip dari Inspektorat	Cukup Jelas	A	
2.	Mewujudkan Masyarakat yang memahami dan menjaga kesatuan bangsa dan politik	Mewujudkan Masyarakat kabupaten paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi pokitik yang demokratis	Penyelenggaraan pemilu	Jumlah yang mengikuti partisipasi politik / Jumlah partisipasi politik X 100%	1,65%	
3.		Mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan ormas	Presentase masyarakat yang difasilitasi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang masih aktif / Jumlah Organsisasi Kemasyarakatan Yang terdaftar X 100%	2,90%	

4.		Mewujudkan ketahanan ekonomi,sosial budaya dan agama	Fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Jumlah terlaksananya peningkatan wawasan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama tahun (n) / Jumlah sosialisasi tahun (n) X 100%	0%	

5.		Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman	Stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser	Jumlah konflik sosial yang terselesaikan / Jumlah Konflik Sosial yang ada X 100%	4,10%	
6.		Meningkatkan pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang ideologi pancasila	Jumlah terlaksananya peningkatan kesadaran masyarakat ttg Ideologi Pancasila / Jumlah Sosialiasi tahun (n) X 100%	8,74%	

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2023, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rumusan tematik pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023 yaitu "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" yang dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing- masing prioritas daerah Kabupaten Paser dituangkan ke dalam sepuluh sasaran daerah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian
2. Berkembangnya sektor kepariwisataan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
5. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
6. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana
8. Meningkatnya kualitas Pendidikan
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
10. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mendukung pencapaian sasaran ke-4 yakni meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan review dan analisa kebutuhan

terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan P-RKPD tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Murni	Target Capaian	Pagu Perubahan
1	2	4	5	6	7	8
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**16.689.387.613**		**14.319.829.093**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	100%	**7.505.905.555**		**7.368.278.762**
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	100%	**194.905.513**		**168.476.422**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	85.229.513		80.564.922
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	52.676.000		39.602.400
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		2 Dokumen	22.000.000		18.224.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	35.000.000		30.084.600
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah	97%	**6.733.472.192**		**6.700.042.269**

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang/ Bulan	6.267.555.604		6.267.555.604
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	270 Dokumen	465.916.588		432.486.665
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Daerah	96%	**497.417.850**		**405.294.420**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	2.320.000		2.304.651
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	137.132.850		166.340.088
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	45.000.000		50.100.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket bahan cetakan penggandaan yang disediakan	2 Paket	32.500.000		34.493.736
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1 Dokumen	5.000.000		5.000.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu	4 Laporan	5.000.000		3.479.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	270.465.000		143.576.946
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	100%	**5.000.000**		**5.000.000**
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	5.000.000		5.000.000
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	**15.500.000**		**26.999.185**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	10.500.000		12.000.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	5.000.000		14.999.185
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Negara yang terpelihara	100%	**59.610.000**		**62.466.466**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan nya	3 Unit	36.000.000		35.966.466
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara	10 Unit	23.610.000		26.500.000

2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase penurunan konflik berbau SARA	100%	**2.284.753.229**		**2.130.407.465**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Teknis dibidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	**2.284.753.229**		**2.130.407.465**
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	3 Dokumen	322.829.907		200.772.770
b	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	25 Orang	221.606.000		150.123.652

	Pembentukan Paskibraka		100 Orang	1.740.317.322	100 Orang	1.779.511.043
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	100%	**2.655.851.490**		**2.482.173.607**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan yang dirumuskan	100%	**2.655.851.490**		**2.482.173.607**

	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	150 Orang	91.000.000		56.375.000

	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	2.414.851.490		2.337.976.390
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Laporan	150.000.000		87.822.217
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	100%	**359.961.800**		**215.360.531**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan	100%	**356.961.800**		**215.360.531**

	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	156.961.800		100.677.053
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	100.000.000		64.591.739
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	100.000.000		50.091.739
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	100%	**1.489.817.770**		**550.000.000**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan agama yang ditindaklanjuti	100%	**1.489.817.770**		**550.000.000**
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	3 Dokumen	663.878.070		250.000.000

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	120 Orang	725.939.700		250.000.000

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	100.000.000		50.000.000
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	100%	**2.369.097.769**		**1.573.608.728**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	**2.369.097.769**		**1.573.608.728**
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen	46.097.769		25.237.884

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun	2 Dokumen	76.097.769		53.798.904

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	20 Orang	150.000.000		82.450.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Orang	420.000.000		283.285.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Laporan	250.000.000		125.000.000

	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota FORKOPIMDA	2 Dokumen	1.453.902.231		1.003.836.940
	T O T A L			**16.689.387.613**		**14.319.829.093**

3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Perubahan Rancangan RKPD 2025 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Paser.

Tabel. 3 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Nama OPD										
	Urusan ……..										
	Tidak Ada Usulan										

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2025, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun perbandingan target capaian dan pagu indikatif pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Murni	Target Capaian	Pagu Perubahan	Bertambah / Berkurang
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**16.689.387.613**		**14.319.829.093**	**(2.369.558.520)**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tanah Grogot	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat	100%	**7.505.905.555**		**7.368.278.762**	**(137.626.793)**
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	11 Dokumen	**89.300.000**		**168.476.422**	**79176422**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	85.229.513		80.564.922	(4.664.591)
	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	52.676.000		39.602.400	(13.073.600)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD			2 Dokumen	22.000.000		18.224.500	(3.775.500)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	35.000.000		30.084.600	(4.915.400)

b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Presentasi temuan yang ditindak lanjutin	97%	**6.733.472.192**		**6.700.042.269**	**(33.429.923)**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah Grogot	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang/ Bulan	6.267.555.604		6.267.555.604	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tanah Grogot	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	270 Dokumen	465.916.588		432.486.665	(33.429.923)
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tanah Grogot	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	96%	**497.417.850**		**405.294.420**	**(92.123.430)**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanah Grogot	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	2.320.000		2.304.651	(15.349)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah Grogot	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	137.132.850		166.340.088	29.207.238
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanah Grogot	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	45.000.000		50.100.000	5.100.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tanah Grogot	Jumlah paket bahan cetakan penggandaan yang disediakan	2 Paket	32.500.000		34.493.735	1.993.735
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanah Grogot	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	5.000.000		5.000.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tanah Grogot	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	5.000.000		3.479.000	(1.521.000)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah Grogot	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	270.465.000		143.576.946	(126.888.054)
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanah Grogot	Tersedianya barang milik daerah	100%	**5.000.000**		**5.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Tanah Grogot	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	5.000.000		5.000.000	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanah Grogot	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	**15.500.000**		**26.999.185**	**11.399.185**

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanah Grogot	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	10.500.000		12.000.000	1.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah Grogot	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	5.000.000		14.999.185	9.999.185
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tanah Grogot	Terpeliharanya Barang Milik Negara yang terpelihara	100%	**59.610.000**		**62.466.466**	**2.856.466**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah Grogot	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan nya	3 Unit	36.000.000		35.966.466	(33.534)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah Grogot	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	10 Unit	23.610.000		26.500.000	2.890.000
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Tanah Grogot	Persentase penurunan konflik berbau SARA	100%	**2.284.753.229**		**2.130.407.465**	**(154.345.764)**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tanah Grogot	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pemantapan bidang ideology Pancasila dan Karekter Bangsa yang dirumuskan	100%	**2.284.753.229**		**2.130.407.465**	**(154.345.764)**
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tanah Grogot	Jumlah kebijakan teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	3 Dokumen	322.829.907		200.772.770	(122.057.137)

b	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Paser	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	25 Orang	221.606.000		150.123.652	(71.482.348)
	Pembentukan Paskibraka	Kab. Paser		100 Orang	1.740.317.322		1.779.511.043	39.193.721
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tanah Grogot	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	100%	**2.655.851.490**		**2.482.173.607**	**(173.677.883)**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Tanah Grogot	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan yang dirumuskan	100%	**2.655.851.490**		**2.482.173.607**	**(173.677.883)**
	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah orang yang Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	150 Orang	91.000.000		56.375.000	(34.625.000)
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tanah Grogot	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	2.414.851.490		2.337.976.390	(76.875.100)

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Laporan	150.000.000		87.822.217	(62.177.783)
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Tanah Grogot	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	100%	**356.961.800**		**215.360.531**	**(141.601.269)**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tanah Grogot	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan	100%	**356.961.800**		**215.360.531**	**(141.601.269)**
	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	156.961.800		100.677.053	(56.284.747)
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	100.000.000		64.591.739	(35.408.261)
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	100.000.000		50.091.739	(49.908.261)
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Tanah Grogot	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	100%	**1.489.817.770**		**550.000.000**	**(939.817.770)**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tanah Grogot	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan agama yang ditindaklanjuti	100%	**1.489.817.770**		**550.000.000**	**(939.817.770)**

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	3 Dokumen	663.878.070		250.000.000	(413.878.070)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Paser	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	120 Orang	725.939.700		250.000.000	(475.939.700)
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	100.000.000		50.000.000	(50.000.000)
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Tanah Grogot	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	100%	**2.396.097.769**		**1.573.608.728**	**(822.489.041)**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tanah Grogot	Terlaksananya kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	**2.396.097.769**		**1.573.608.728**	**(822.489.041)**
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen	46.097.769		25.237.884	(20.859.885)

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	Tanah Grogot	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang disusun	2 Dokumen	76.097.769		53.798.904	(22.298.865)
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah orang yang mengikuti Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah	20 Orang	150.000.000		82.450.000	(67.550.000)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Orang	420.000.000		283.285.000	(136.715.000)
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tanah Grogot	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6 Laporan	250.000.000		125.000.000	(125.000.000)

	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Tanah Grogot	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota FORKOPIMDA	2 Dokumen	1.453.902.231		1.003.836.940	(450.065.291)
TOTAL					**16.689.387.613**		**14.319.829.093**	**(2.369.558.520)**

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tanah Grogot, April 2025

Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Paser

PEMERINTAH KABUPATEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PASER

Nonding, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 197106071997031007